



# **RINGKASAN**

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019**

**BAPPEDA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2019**

## I. PENDAHULUAN.

Proses penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan masa transisi karena pada saat penyusunannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 telah berakhir, sementara dokumen RPJMD kabupaten Madiun tahun 2019-2023 belum terbentuk. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Madiun dilangsungkan pada bulan April 2018. Terkait dengan hal tersebut, maka dasar penyusunan RKPD Kabupaten Madiun ini mengacu pada ketentuan Pemendagri No. 86 Tahun 2017 bagian Kesembilan Pasal 147 yang menyatakan bahwa Penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD maka penyusunannya berpedoman pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Madiun serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

Kedudukan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari RPJMD kabupaten madiun tahun 2019-2023 yang sedang disusun di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Hari Wuryanto, sehingga mengacu pada isu-isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2019-2023 serta memuat prioritas pembangunan yang mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. Sehingga tema yang diangkat dalam RKPD ini merupakan elaborasi antar berbagai dokumen yang terkait untuk menjamin keselarasannya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018 adalah :

### ***“KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018”***

Dalam mewujudkan visi dimaksud, maka dirumuskan beberapa misi antara lain:

1. Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis;
2. Meningkatkan Sistem Sosial yang Dinamis, Berkeadilan dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya.

## II. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Dari hasil analisis isu strategis dan permasalahan yang termuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 serta untuk sinergitas, sinkronisasi dan integritas antara pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional, maka Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dapat disampaikan sebagai berikut;

### 1. Permasalahan Kemiskinan

Angka kemiskinan relatif cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, disebabkan beberapa hal :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terjangkau secara optimal;
- b. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin; dan
- d. Aksebilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah.

### 2. Permasalahan Pengangguran.

Berdasarkan data yang ada, bahwa angka pengangguran terbuka pada tahun 2016 tercatat sebanyak 15.140 orang telah ditempatkan melalui program AKL, AKAD, AKAN sebanyak 6.356 orang, sehingga masih tersisa 8.784 orang, terbanyak lulusan SLTA ke atas. Kebutuhan lapangan pekerjaan secara alami terus bertambah seiring dengan penambahan angkatan kerja. Setiap tahun > 10% lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA. Lulusan SLTA tidak seluruhnya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Semua itu menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia juga menuntut keahlian tertentu.

### 3. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Makro Daerah.

Masalah utama dalam meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain; (a) Pertumbuhan PDRB; (b) PDRB Per Kapita; (c) Laju Inflasi; dan (d) Angka

Pengangguran Terbuka. Permasalahan-permasalahan tersebut diatas jika tidak segera dikelola secara komprehensif, maka baik langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi pada : lemahnya daya beli masyarakat dan redupnya aktivitas perekonomian, yang akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas dan pada akhirnya akan melemahkan daya saing pemerintah daerah.

#### **4. Permasalahan Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Rendahnya daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten madiun masih perlu ditingkatkan. Perubahan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini membawa dampak pada meningkatnya kerusakan berbagai infrastruktur, antara lain : jalan, jembatan dan irigasi pertanian. Bertambah panjang jalan dan jaringan irigasi berdampak meningkat pula beban pemeliharaan dan pembiayaan yang tinggi. Ketersediaan infrastruktur menjadi faktor utama pendorong percepatan pertumbuhan daerah dan pedesaan.

#### **5. Permasalahan di Bidang Pelayanan Dasar**

Masalah pokok di bidang pembangunan kemasyarakatan adalah masih belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat. Jenis layanan dasar masyarakat terdiri dari: pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitas infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan dan sekaligus membuka wilayah yang masih terpencil, terbelakang dan tertinggal.

Kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar sudah semakin tinggi seiring dengan semakin terbukanya arus informasi digital. Pelayanan di bidang kesehatan saat ini sudah semakin meningkat, tidak hanya membutuhkan kemudahan mendapatkan pelayanan juga menuntut peningkatan kualitas layanan. Sekalipun kebijakan pelayanan kesehatan dan pendidikan senantiasa dikembangkan, utamanya pelayanan bagi keluarga miskin dan berpendapatan rendah, namun masih ada masyarakat yang merasakan tingginya biaya obat-obatan dan pendidikan karena daya beli yang masih rendah. Khusus untuk masalah pendidikan diperlukan peningkatan pendidikan baik itu pendidikan dalam sekolah maupun pendidikan luar sekolah yaitu *life skill*.

#### **6. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Kapasitas fiskal daerah merupakan faktor utama pendukung kegiatan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah belum teritegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 394 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

#### **7. Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Kualitas kelestarian lingkungan hidup harus tetap dijaga dalam kerangka mencegah dan mengendalikan kerusakan SDA dari dampak aktivitas sosial perekonomian. Permasalahan yang perlu ditanggulangi difokuskan pada aspek IKLH, yaitu (a) pencemaran air, (b) pencemaran tanah dan (c) tutupan lahan.

#### **8. Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi.**

Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi juga masih perlu mendapatkan perhatian. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 juga masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar OPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

#### **9. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkorelasi secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan selanjutnya berdampak domino terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun, antara lain sebagai berikut; (a) Penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel; (b) Penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, cepat, tepat, mudah dan murah; (c) Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (d) Penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik dan benar; (e) Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); (f) Belum optimalnya penerapan pola pengembangan karir PNS;

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan benar perlu terus menerus diwujudkan, terutama meliputi perundang-undangan, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta *mind set* dan *culture set*. Perlunya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Madiun.

#### **10. Permasalahan dalam Penegakan Peraturan Daerah**

Penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti dengan Lembaga Legislatif (DPRD), akan terus didorong dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

#### **11. Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha.**

Permasalahan di bidang kerjasama antar daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara konkrit, masih ditemui berbagai kendala baik teknis maupun administratif. Dengan demikian, Kesepakatan dan Kesepahaman (MoU)/ Memorandum of Understanding) yang telah disepakati oleh berbagai pihak, terhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah, maka berbagai kesepakatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama akan diimplementasikan. Dengan implementasi tersebut diharapkan akan mendorong terjadinya berbagai kemajuan, diantaranya meningkatnya arus investasi, meningkatnya pendapatan asli daerah dan terbukanya lapangan kerja baru.

Beberapa Permasalahan di atas diidentifikasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya kekurangan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) meliputi Guru, Pengawas dan Penilik.</li> <li>2. Belum adanya Pemerataan Guru antar sekolah maupun antar wilayah, khususnya GTT.</li> <li>3. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan</li> <li>4. Perlunya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan Kepribadian Berkelanjutan (PKB)</li> <li>5. Perlunya pengembangan pembinaan karakter siswa, salah satunya dengan menambah ekstrakurikuler Baca Tulis Al Quran pada sekolah negeri.</li> <li>6. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi</li> </ol>
2	Urusan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal</li> <li>2. Rasio dokter / tenaga medis &amp; Paramedis masih kurang</li> <li>3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah</li> <li>4. Belum semua puskesmas terakreditasi</li> <li>5. Pemanfaatan alkes belum optimal</li> <li>6. Kondisi/bangunan fisik puskesmas dan jaringannya masih ada yang tidak memenuhi syarat</li> </ol>
3a	Urusan Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio jalan dalam kondisi rusak yang belum tertangani masih cukup banyak.</li> <li>2. Masih banyak jembatan rusak yang belum tertangani akibat belum terinventarisir atau belum masuk dalam database (Dok SK Bupati).</li> <li>3. Terbatasnya tenaga pekarya (jalan dan Irigasi) atau operator alat berat serta laborat, karena tidak adanya penambahan pegawai</li> <li>4. Perlu penambahan alat berat sebagai penunjang pembangunan infrastruktur (Alat berat yang ada sudah terlalu tua dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi)</li> <li>5. Revitalisasi kota mejayan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan masyarakat</li> <li>6. Perlunya penanganan / pemeliharaan drainase jalan terutama wilayah perkotaan.</li> </ol>
3b	Urusan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyusunan RDTRK di kawasan jalur Tol Trans Jawa yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan.</li> <li>2. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan LP2B di</li> </ol>



NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		Kabupaten Madiun
		3. Belum adanya penyusunan RDTRK yang terintegrasi untuk pengembangan Kawasan Pariwisata
		4. Belum seluruh kawasan strategis daerah memiliki RDTRK, sesuai kebijakan Perda RTRW Kab. Madiun No 9 tahun 2011
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh.
		2. Rendahnya daya dukung sarpras wilayah permukiman
		3. Belum terlembaganya sistim penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
		4. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman
		5. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman
		6. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan pemukiman.
5	Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu dikembangkan lebih optimal.
6	Urusan Sosial/ Kesejahteraan Masyarakat	1. Perlunya peningkatan ketrampilan / lapangan kerja bagi fakir miskin (PMKS).
		2. Penanggulangan kemiskinan (PMKS) berbasis masyarakat masih relatif rendah.
		3. Perlunya penambahan kendaraan operasional pengiriman bantuan untuk pasca bencana.
		4. Kab. Madiun belum memiliki sarana pelayanan dan panti rehabilitasi sosial tingkat kabupate bagi PMKS.
		5. Kab. Madiun belum memiliki Kelembagan Sosial Persatuan Disabilitas tingkat kabupaten.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Urusan Tenaga Kerja	1. Perlunya optimalisasi pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan.
		2. Peningkatan layanan Perlindungan CTKI/TKI didaerah kantong-kantong TKI belum terkoordinasi dengan baik.
		3. Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan tahun 2013-2016
		4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Madiun mengalami penurunan pada tahun 2013-2016

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan hasil kerja mereka.
		6. Pemenuhan pelayanan sistem informasi ketenagakerjaan daerah.
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih dibawah Provinsi Jatim dan nasional.
		2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
		3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
		4. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak.
3	Urusan Pangan	1. Implementasi program dan kesadaran masyarakat tentang KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) masih kurang maksimal.
		2. Ketersediaan bahan pangan (Sayur, buah dan ikan) belum mencukupi kebutuhan konsumsi / masih mendatangkan dari luar daerah.
		3. Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
		4. Belum terkontrolnya peredaran komoditas bahan pangan utama dari / ke Kab. Madiun.
		5. Program Kelompok Lumbung Pangan masih banyak yang belum aktif.
		6. Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan pangan lokal (di kawasan pariwisata)
		7. Pola konsumsi beras sebagai konsumsi utama masyarakat masih cukup tinggi.
		8. Belum berkembangnya Teknologi Tepat Guna secara terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
3	Urusan Pertanahan	1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
		2. Masih adanya konflik pertanahan antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah daerah.
		3. Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Masih terdapat sampah sebesar 83% di masyarakat yang belum tertangani ke TPA yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara.
		2. Pembuangan limbah industri dan limbah domestik sebagian masih dibuang ke sungai yang berdampak pada pencemaran sumber air
		3. Perlunya pengawasan terhadap asap cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor dan aktivitas pertambangan yang dapat mencemari kualitas udara.
		4. Perlu adanya regulasi tentang penggunaan lahan baik untuk perumahan, gudang dan bangunan pabrik.
6	Urusan Pengendalian Kependudukan dan KB	1. Lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKBPK.
		2. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber KB

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Masih rendahnya peserta KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
		4. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
		5. Tingginya perkawinan dengan usia Istri < 20 thn
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	1. Perlunya pembinaan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 di tingkat desa
		2. Kompetensi SDM penyelenggara pemerintahan desa masih relatif rendah.
		3. Pengelolaan keuangan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan masih belum optimal
		4. Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.
		5. Regulasi yang menindaklanjuti pasca program PNPM MPd belum dapat ditindaklanjuti secara optimal. Belum adanya petunjuk teknis operasional yang secara spesifik dan mendetail terkait proses integrasi lembaga ekonomi ke dalam wadah BUMDesa.
		6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal.
		7. <i>Bimtek pengelolaan HIPPAM dari 84 Pokmas belum terpenuhi secara keseluruhan.</i>
		8. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa (SDA dan TTG)
		9. Pengembangan potensi atau produk unggulan desa (prokudes) belum maksimal
		10. Belum optimalnya database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di perdesaan.
		11. Validitas isian data dan pemanfaatan profil desa dan kelurahan belum berjalan secara optimal.
8	Urusan Perhubungan	1. Pembangunan PUSPEM baru di Mejayan sehingga membutuhkan perencanaan Sarpras transportasi yang baik
		2. Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Madiun masih perlu didukung oleh Sarpras Lalu lintas yang memadai
		3. Tingginya angka laka lantas ditingkat pelajar yang membutuhkan penaganan kebijakan LLAJ yang tepat dan afirmatif
		4. Sarana Prasarana Lalu Lintas yang belum tersedia maksimal, karena wilayah pelayanan yang relatif luas.
9	Urusan Komunikasi & Informatika	1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih belum maksimal
		3. Kelembagaan komunikasi dan informatika belum maksimal
		4. Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		5. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal
10	Urusan Koperasi	1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
		2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha
		3. Keterbatasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan Usaha KUMKM.
11	Urusan Penanaman Modal	1. Investasi belum maksimal karena belum ada OPD teknis yang menangani urusan penanaman modal, mengingat KPPT hanya fokus terhadap pelayanan perizinan dan tidak penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan iklim investasi.
		2. Capaian realisasi investasi masih belum memenuhi target RPJMD (Investor yang mengajukan SIUP).
		3. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan secara luas kepada calon investor
		4. Regulasi teknis terkait penanaman modal belum disusun sebagai pedoman bagi calon investor untuk berinvestasi di Kab. Madiun
		5. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		6. Sebagian investor masih belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya (LKPM) sehingga menghambat pengawasan.
		7. Belum maksimalnya pelaksanaan PTSP di Kab. Madiun.
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Relatif kecilnya kelompok atau grup kepemudaan. 2. Relatif rendahnya even dan prestasi kepemudaan dan olah raga daerah.
13	Urusan Statistik	1. Tupoksi pengelola data statistik sektoral belum terwadahi pada struktur kelembagaan OPD (setiap bidang/seksi) 2. Konsistensi data statistik sektoral belum maksimal 3. Publikasi data statistik sektoral melalui media komunikasi / multi media belum optimal
14	Urusan Persandian	1. Kualitas dan kapasitas SDM Persandian belum memadai 2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan. 3. Kesadaran mengenai keamanan informasi belum berkembang secara optimal di lingkungan ASN Kab Madiun.
15	Urusan Kebudayaan	1. Relatif terbatasnya jumlah dan kualitas sanggar seni di kab. Madiun. 2. Kurangnya Sarana Prasarana dan SDM Pembina kegiatan Seni dan budaya. 3. Banyaknya benda cagar budaya yang berada di kabupaten yang belum dikelola dengan optimal. 4. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah 5. Penerapan nilai-nilai dan seni budaya yang terus mengalami penurunan akibat adanya globalisasi.
16	Urusan Perpustakaan	n.a.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
17	Urusan Kearsipan	n.a.
<b>III URUSAN PILIHAN</b>		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Perlunya peningkatan kontribusi perikanan (darat) bagi perekonomian daerah.
2	Urusan Pariwisata	1. Pengembangan pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain seperti Industri kreatif dan sektor lainnya. 2. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata. 3. Relatif rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Madiun. 4. Strategi promosi pariwisata Kab Madiun perlu ditingkatkan.
3	Urusan Pertanian	1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 2. Terbatasnya akses petani terhadap saprodi dan permodalan 3. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian 4. Pentingnya penyuluhan kepada petani dalam menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta penyakit tanaman. 5. Terjadinya penurunan daya dukung lahan dan sumberdaya air 6. Belum adanya pengawasan secara intensif terhadap keluar masuknya ternak. 7. Perlunya penyuluhan dalam mengatasi ancaman penyakit ternak yang dapat mengganggu produktivitas 8. Belum tercapainya swasembada daging sapi secara berkelanjutan. 9. Belum maksimalnya luas lahan perikanan produktif 10. Belum tercapainya swasembada ikan secara berkelanjutan. 11. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan penyerapan informasi oleh petani 12. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh 13. Rendahnya posisi tawar petani di pasar input dan output.
4	Urusan Kehutanan	1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan sektor lain yang terkait.
5	Urusan energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perlunya penataan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan bukan logam (Galian C) yang terkait pajak dan prosedur pertambangan. 2. Pengembangan Energi Baru Terbarukan belum berjalan secara optimal. 3. Energi kelistrikan di Bidang ESDM masih tahap rintisan, sehingga selalu koordinasi dengan ESDM Prov Jatim terkait pengembangan energi kelistrikan.
6	Urusan Perdagangan	1. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa 2. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi pedagang kecil sektor informal dan perdagangan kaki lima 3. Kurang optimalnya perlindungan konsumen dan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		pengamanan pasar dalam negeri
7	Urusan Perindustrian	1. Pendukung daya saing industri di kab Madiun masih perlu ditingkatkan. 2. Diperlukan peningkatan SDM, ketrampilan dan penguasaan teknologi khususnya yang mendukung Industri Kecil
8	Urusan Transmigrasi	1. Adanya penurunan Pagu Alokasi kegiatan perpindahan dan penempatan Transmigrasi di Kabupaten Madiun

### III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Keterkaitan Tema RKP 2019, Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2019 dan Tema RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut :

TEMA RKP TAHUN 2019	NASIONAL	PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS
------------------------	----------	---

TEMA RKPD TAHUN 2019	JAWA TIMUR	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TIMUR SEBAGAI PENGUNGKIT PERTUMBUHAN INKLUSI
-------------------------	------------	---

TEMA RKPD TAHUN 2019	KABUPATEN MADIUN	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SDM DAN KEPARIWISATAAN MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSI
-------------------------	---------------------	--

Memperhatikan permasalahan pembangunan yang ada, maka Program Prioritas Kabupaten Madiun bisa dijabarkan sesuai dengan Tema Pembangunan vertikal dan isu strategis sebagai berikut :

#### Paket Prioritas 1

<b>RKP 2019</b>	: Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
<b>RKPD Jatim 2019</b>	: Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.
<b>RKPD Kab Madiun 2019</b>	: Peningkatan pelayanan dasar
<b>Isu strategis</b>	: IS 1 : Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ; IS 2 : Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan

	IS 6 : Tatakelola Pemerintah Daerah yang inovatif dan handal guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.
	IS 10 : Penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan, antara lain;

1. Pengembangan metode pembelajaran yang inovatif
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Penanganan Fakir miskin dan penyandang masalah sosial
4. Penguatan pengarusutamaan gender
5. Pengembangan perumahan layak huni
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Ditambah program public services
8. Program Kinerja dan Reformasi Birokrasi

### Paket Prioritas 2

<b>RKP 2019</b>	: Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
<b>RKPD Jatim 2019</b>	: Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan.
<b>RKPD Kab Madiun 2019</b>	: Pengembangan Infrastruktur sesuai dengan konsep pengembangan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP)
<b>Isu Strategis</b>	: IS 5 : Pemenuhan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata.

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas Program di atas sebagaimana dijabarkan dalam poin di bawah ini;

1. Penanganan wilayah kumuh dengan pemberdayaan komunitas perumahan
2. Penanganan dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan

3. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
4. Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah, air bersih dan penanganan sampah

### Paket Prioritas 3

<b>RKP 2019</b>	: Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
<b>RKPD Jatim 2019</b>	: Peningkatan nilai tambah agro dan maritime melalui industry serta pemanfaatan akselerasi pariwisata
<b>RKPD Kab Madiun 2019</b>	: Pengembangan ekonomi melalui agribisnis
<b>Isu Strategis</b>	: IS 3 : Penguatan struktur ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa ;
	IS 4 : Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya ;
	IS 8 : Penguatan desa mandiri melalui optimalisasi pengolahan potensi lokal ;
	IS 11 : Pengembangan kepemudaan, seni dan olah raga.

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas di atas, antara lain;

1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan serta usaha jasa peralatan berbasis pertanian terpadu
2. Peningkatan kemitraan Usaha Mikro dalam rangka penguatan kemampuan managerial, teknologi, permodalan dan pemasaran
3. Peningkatan kualitas dan Pemberdayaan Koperasi
4. Peningkatan daya tarik industri kreatif berbasis sumberdaya lokal daerah
5. Peningkatan Perluasan jaringan pasar dan promosi produksi daerah
6. Peningkatan jaminan kepastian hukum bagi investor
7. Pengembangan destinasi pariwisata unggulan
8. Peningkatan kelembagaan pariwisata
9. Peningkatan pemasaran dan industri pariwisata



#### Paket Prioritas 4

<b>RKP 2019</b>	: Pemantapan Ketahanan Energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.
<b>RKPD Jatim 2019</b>	: Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
<b>RKPD Kab Madiun 2019</b>	: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Hidup yang brkelanjutan
<b>Isu Strategis</b>	: IS 7 : Pengelolaan lingkungan yang sinergi dengan kebijakan tata ruang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan, antara lain sebagai berikut;

1. Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
2. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung
3. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
4. Program Pengembangan Tanaman Pangan.
5. Pengembangan energy baru dan terbarukan

#### Paket Prioritas 5

<b>RKP 2019</b>	: Stabilitas keamanan Nasional dan kesuksesan pemilu.
<b>RKPD Jatim 2019</b>	: Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu
<b>RKPD Kab Madiun 2019</b>	: Terjaminnya stabilitas wilayah dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu
<b>Isu Strategis</b>	: IS 9 : Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya lokal

Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Paket Prioritas Program di atas sebagaimana dijabarkan dalam poin di bawah ini;

1. Optimalisasi Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4. Program Penegakan Produk Hukum Daerah
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan kehidupan Beragama

Adapun upaya (*effort*) pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya prioritas program sebagaimana disebutkan di atas maka akan dilakukan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan Smart Regency.
  - a. Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI dan Komunikasi.
  - b. Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2. Pengembangan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan daya dukung konektivitas antar wilayah.
  - a. Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan
  - b. Program peningkatan jalan dan jembatan
  - c. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  - e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - f. Program pengembangan tata ruang
  - g. Program penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

### **TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2016, di mana tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun sebesar 5,33% lebih baik daripada tahun 2016 yang hanya 5,27%. Untuk Tahun 2019 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun diharapkan mencapai 5,37%.

Untuk indikator pembangunan lainnya pada tahun 2017 juga menunjukkan trend lebih baik, yakni :

1. Tingkat kemiskinan sebesar 12,06% menurun 0,63% dibandingkan tahun 2016.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 sebesar 4,1%, lebih baik 2.57% dibandingkan tahun 2016.
3. Indeks Gini, pada tahun 2017 pencapaian sebesar 0,32 poin, membaik dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 0,34 poin, dan target pencapaian tahun 2019 adalah 0,33 poin.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari angka 69,67 di tahun 2016 menjadi 69,96 di tahun 2017 dengan target 71,62 di tahun 2019. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM terdiri dari 4 (empat) komponen penyusun, yaitu : Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian tahun 2017 sebesar 13,36 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,15 tahun, Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) 70,21 tahun dan Pengeluaran Perkapita Per Tahun yang disesuaikan sebesar Rp.645.543,-.